

ABSTRAK

Skripsi ini dalam penulisannya menggunakan tipe penelitian hukum doctrinal yang bersifat normatif. Pendekatan yang dipilih dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis untuk menjawab dan menjelaskan mengenai rumusan masalah berupa Tindak Pidana Terkait Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi *Covid-19* dan Pertanggungjawaban Pidana Terkait Penolakan Pemakaman Jenazah Kasus Konfirmasi *Covid-19*.

Fenomena penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* semakin banyak dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan penyebaran virus *Covid-19* sebagaimana disebutkan dalam grafik kenaikan kematian pasien *Covid-19* yang diperbarui setiap hari oleh Kementerian Kesehatan RI. Meskipun telah diterbitkan secara resmi pedoman pemulasaraan dan pemakaman oleh Kementerian Kesehatan RI, namun tindakan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi masih banyak dilakukan sehingga menimbulkan berbagai kerugian. Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlunya mengetahui adanya kualifikasi-kualifikasi tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penolakan pemakaman jenazah kasus konfirmasi *Covid-19* dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dalam ketentuan di KUHP, UU Wabah Penyakit Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Kata Kunci: Penolakan Pemakaman, Jenazah *Covid-19*, Pertanggungjawaban Pidana,

ABSTRACT

This thesis uses the normative doctrinal type of legal research. The approaches were chosen in preparing this thesis are the statute approach, case approach, and conceptual approach. The legal material used is the relevant legislation and the criminal case decision as a primary legal material and books, journals, or websites as a secondary legal materials. The legal material is analyzed to answer and explain the formulation of the problem in the form of Criminal Acts Related to The Refusal of Funeral Bodies Covid-19 Confirmation Case and Criminal Liability Related to Refusal of Funeral Bodies Covid-19 Confirmation Case.

The phenomenon of refusal of burial of Covid-19 confirmed bodies is increasingly due to public concerns about the spread of the Covid-19 virus as mentioned in the graph of the increase in Covid-19 patient deaths that is updated daily by the Ministry of Health of the Republic of Indonesia. Although it has been officially published guidelines for repatriation and burial by the Ministry of Health, but the act of refusing funeral bodies confirmation cases are still widely carried out resulting in various losses. With regard to this, it is necessary to know the qualifications of criminal acts related to the refusal of funeral bodies Covid-19 confirmation case.

The results of the research showed that the act of refusal of burial of Covid-19 confirmation case can be qualified as a criminal act and perpetrators can be held criminally accountable as stipulated in the KUHP, UU Wabah Penyakit Menular, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Key Word: *Funeral Refusal, Covid-19 Bodies, Criminal Liability.*